



Analisis Peta Mutu Pendidikan SMA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Mohamad Tohar

Pengawas SMA Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB

*Corresponding Author. Email: tohar121165@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to produce a portrait of the educational quality of Central Lombok High School in 2020 through the process of data collection, environmental analysis, as well as recommendations and quality improvement strategies referring to the results of mapping the quality of education in order to be an inspiration for education units and local governments in implementing SPMP, properly and sustainably. The research method used is descriptive qualitative. This research data collection includes 2020 quality report cards sourced from Dapodik and data sourced from PMP. Based on the results of the analysis of the high school education quality map, it was concluded that none of the senior high schools "Towards SNP 5" or obtained the SNP criteria even though the accreditation status was A, and "Towards SNP 4", with B accreditation as many as eleven schools, "Towards SNP 4" with three schools have C accreditation status, "Towards SNP 2" with C accreditation status of two schools, "Towards SNP 1" with C accreditation status as many as one school. Based on an analysis of the strengths and weaknesses of each indicator to the sub-indicators of each standard, a portrait of the achievement of the SNP is obtained that needs to be recommended to education stakeholders, including quality improvement strategies that can be carried out to improve the performance of education units.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan potret capaian mutu pendidikan SMA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 melalui proses pengumpulan data, analisis lingkungan, serta rekomendasi dan strategi peningkatan mutu mengacu pada hasil pemetaan mutu pendidikan agar menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini meliputi data rapor mutu 2020 yang bersumber dari Dapodik maupun data yang bersumber dari PMP. Berdasarkan hasil analisis peta mutu pendidikan SMA ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada satupun SMA yang "Menuju SNP 5" atau memperoleh kriteria SNP walaupun status akreditasinya A, dan "Menuju SNP 4", dengan akreditasi B sebanyak sebelas sekolah, "Menuju SNP 4" dengan status akreditasi C sebanyak tiga sekolah, "Menuju SNP 2" dengan status akreditasi C sejumlah dua sekolah, "Menuju SNP 1" dengan status akreditasi C sebanyak satu sekolah. Berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan setiap indikator sampai sub indikator pada setiap standar, diperoleh potret pencapaian SNP yang perlu untuk direkomendasikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, termasuk strategi peningkatan mutu yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan.

Article History

Received: 20-11-2021

Revised: 16-12-2021

Accepted: 22-03-2022

Published: 05-04-2022

Key Words:

Quality of Education,
Quality Standards, Senior
High School

Sejarah Artikel

Diterima: 20-11-2021

Direvisi: 16-12-2021

Disetujui: 22-03-2022

Diterbitkan: 05-04-2022

Kata Kunci:

Mutu Pendidikan, Standar
Mutu, SMA

How to Cite: Tohar, M. (2022). Analisis Peta Mutu Pendidikan SMA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020. *Jurnal Paedagogy*, 9(2), 228-240. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v9i2.4971>



<https://doi.org/10.33394/jp.v9i2.4971>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta



meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia (Putra, 2021; Rusdi, 2020). Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sistem ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Penjaminan dimaksud secara rinci implementasinya pada satuan pendidikan, baik dasar maupun menengah. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 yang disempurnakan untuk kedua kalinya dengan PP No. 13 tahun 2015). Penjaminan mutu pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara implementatif, diterbitkan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, agar menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat termasuk satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu. Sistem ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri, partisipatif, terstandar, integritas, sistematis, berkesinambungan, holistik, transparan dan akuntabel, sehingga terbangun budaya mutu. Dengan terlaksananya budaya mutu di satuan pendidikan, akan mendorong peningkatan mutu yang berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap, sehingga SNP akan terpenuhi bahkan terlampaui.

Sistem penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan atau sekolah, penyelenggara program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk memperbaiki mutu pendidikan (Prayoga, 2020; Yuniati, 2019; Supatni, 2017). Penjaminan mutu pendidikan diperlukan: (1) mutu pendidikan bervariasi antarsekolah/ madrasah, antardaerah; (2) setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu; (3) perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan (4) mutu pendidikan yang rendah akan menyebabkan daya saing SDM rendah (Suginam, 2019; Purnamaraya, 2019; Rusmiarsi, 2017).

Standar mutu ditetapkan oleh lembaga standarisasi. Satuan pendidikan melakukan pengumpulan berbagai data dan informasi kemudian mencatatnya dalam aplikasi Dapodikdasmen, juga melakukan evaluasi diri sekolah melalui aplikasi e-EDS. Dari kedua aplikasi ini dengan porsi masing-masing dihasilkan luaran berupa rapor mutu. Rapor mutu merupakan potret kondisi mutu sekolah diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi sekolah dalam perancangan untuk perbaikan mutunya. Dalam konsep SPMP, peningkatan mutu dilaksanakan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai baseline untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan, sehingga dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan jelas.

Aplikasi pemetaan mutu dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah sistem penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Di dalam aplikasi PMP tersedia kuesioner untuk setiap stakeholder sekolah yang digunakan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.



Secara teknis aplikasi pemetaan mutu mengintegrasikan Aplikasi Dapodik, maka aplikasi PMP akan dapat diinstall dan berjalan jika dikomputer tersebut telah terinstall aplikasi Dapodik. Secara otomatis aplikasi PMP akan mengambil entitas data pokok dari aplikasi Dapodik seperti data profil sekolah, PTK, peserta didik, dan lainnya. Selanjutnya aplikasi PMP akan menampilkan daftar pertanyaan/kuesioner untuk masing-masing entitas data tersebut berdasarkan indikator mutu yang ada.

Penyusunan peta mutu dikembangkan mengacu 8 SNP, disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, carta, matriks, dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Adapun penyusunan analisis hasil peta mutu pendidikan tahun 2020 ini bertujuan menghasilkan potret capaian mutu pendidikan melalui proses pengumpulan data, analisis lingkungan, serta rekomendasi dan strategi peningkatan mutu mengacu pada hasil pemetaan mutu pendidikan agar menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah. Manfaat analisis hasil peta mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan penjaminan mutu pemerintah daerah dan rujukan satuan pendidikan sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sebagaimana tuntutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang artinya data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP ini diperoleh dari data rapor mutu 2020 yang terkumpul dan dipublikasikan per 1 Juni 2021, baik data yang bersumber dari Dapodik (dapodikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian tersebut meliputi: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan dan (8) standar pembiayaan. Data eksternal selain rapor mutu 2020 meliputi data status seekolah (negeri/swasta) dan data akreditasi sekolah yang diperoleh dari LPMP Nusa Tenggara Barat.

Rentang skor capaian SNP adalah antara 0,00 - 7,00 sebagaimana diatur dalam kategori capaian rapor mutu 2020. Rentang tersebut memberikan informasi capaian dalam bentuk kategori sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Capaian SNP

	Kategori	Batas atas	Batas Bawah
*	Menuju SNP 1	0	2.04
**	Menuju SNP 2	2.05	3.70
***	Menuju SNP 3	3.71	5.06
****	Menuju SNP 4	5.07	6.66
*****	SNP	6.67	7.00

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi Pengisian Data Mutu Jenjang SMA

- Jika dilihat pada Tabel 2 sebagian besar SMA di Lombok Tengah sudah melakukan pengiriman data PMP. Jumlah SMA di Kabupaten Lombok Tengah dalam aplikasi PMP sebanyak 54. Sebanyak 88,89% atau 48 sekolah telah mengirimkan data pemetaan mutu sekolah melalui aplikasi e-EDS. Berdasarkan data pengiriman tersebut, tim pengembang melakukan agregasi dan pengolahan data mutu terhadap 54 SMA atau



sebanyak 100%, sehingga diperoleh sebanyak 37 sekolah atau 68,52% telah memiliki rapor mutu dan sisanya 31,48% sekolah tidak memiliki rapor mutu 2020.

- b) Adapun SMA yang belum melakukan pengiriman data PMP berada di Kecamatan Jonggat, Praya Barat, Batukliang, Praya, dan Kopang. Namun dari total sekolah yang sudah melakukan pengiriman di setiap kecamatan, tidak semua data dapat diolah dan tidak memiliki rapor mutu. Kecamatan Kopang memiliki presentase tertinggi dari sekolah yang telah terbit rapor mutu sekolah yaitu 5 SMA dari seluruh sekolah yang telah melakukan pengiriman PMP. Adapun sekolah yang tidak mengirim PMP tahun 2020 disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :(a) sekolah yang baru memiliki izin operasional pada tahun 2020 sehingga belum bisa terbaca pada aplikasi PMP;(b) anggapan sekolah bahwa program PMP tidak terlalu penting dalam pengembangan Sekolah; (c) tidak adanya sanksi apapun bagi sekolah yang tidak melakukan pengisian kuesioner PMP; (d) aplikasi EDS yang masih banyak kendala sehingga operator harus bekerja berulang kali dan; (e) kurang antusiasnya warga sekolah terhadap program PMP.

Tabel 2. Jumlah Sekolah yang Mengirim Data dan Rapor Mutu yang Terbit Tiap Kecamatan Jenjang SMA

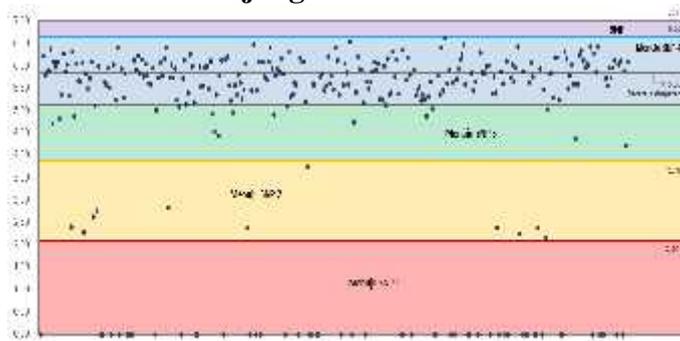
Kecamatan	Total Sekolah	Jumlah Kirim	Jumlah Rapor Mutu	Jumlah belum kirim dan belum rapor mutu	% Kirim	% Rapor Mutu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)/(2)	(7)=(4)/(2)
Praya	3	3	3	0	10	10
Praya	2	2	1	1	10	50
Jonggat	6	5	4	2	83	66
Janapria	3	3	3	0	10	10
Batukliang	1	1	1	0	10	10
Praya	3	2	2	1	66	66
Pujut	5	5	3	2	10	60
Batukliang	7	6	5	2	85	71
Praya	1	9	8	2	90	80
Pringgabaya	3	3	1	2	10	33
Praya	3	3	3	0	10	10
Kopang	8	6	3	5	75	37
Total	5	4	3	17	88	68

Tabel 3. Distribusi Sekolah Berdasarkan Capaian SNP Setiap Standar dan Kriteria Jenjang SMA Tahun 2020

c	Std. Kompetensi Lulusan	Std. Isi	Std. Proses	Std. Penilaian Pendidikan	Std. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Std. Sarana dan Prasarana Pendidikan	Std. Pengelolaan Pendidikan	Std. Pembiayaan	Capaian SNP
Menuju SNP 1	1	2	5	0	1	4	0	0	0
Menuju SNP 2	0	1	0	2	5	7	0	0	1
Menuju SNP 3	2	3	4	2	2	26	8	1	0
Menuju SNP 4	23	29	28	29	25	0	18	12	14
SNP	6	0	0	1	3	0	5	2	0
Jumlah	32	35	37	34	36	37	31	15	15



Gambar 1. Jumlah Rapor Mutu yang Terbit Berdasarkan Status Sekolah Jenjang SMA Sebaran Capaian Mutu Sekolah Jenjang SMA Tahun 2020



Gambar 2. Scatter Plot Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2020

Peta mutu capaian SNP untuk jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dapat dilihat dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 didapatkan bahwa capaian mutu SNP tahun 2020 jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah didominasi dengan kategori “Menuju SNP 4” yaitu sebanyak 52% sekolah dari 54 SMA yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Faktor penyebab dari dominasi tersebut, antara lain:

- dampak dari optimalisasi penggunaan dana BOS dalam pembiayaan operasional sekolah;
- keberadaan aplikasi Dapodik dan turunannya yang sudah mulai dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid;
- kesadaran pentingnya data dari pemangku kebijakan di sekolah yang mulai meningkat dan;
- SMA di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh sekolah yang terakreditasi A sebanyak lima belas SMA dan sudah terakreditasi B sebanyak empat belas SMA.

Capaian Masing-masing SNP Jenjang SMA

Pencapaian mutu pendidikan masing-masing SNP Jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah masih rendah jika dibandingkan dengan capaian mutu pendidikan masing-masing SNP jenjang SMA di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tingkat nasional. Jika dilihat pada Gambar 3 dengan berdasarkan pada hasil PMP tahun 2020, rerata capaian mutu SMA di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5,34. Angka ini lebih rendah dari rerata capaian mutu SMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 5,48. Sedangkan secara nasional, rerata capaian mutu SMA adalah 5,43. Capaian mutu tertinggi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional masih pada standar kompetensi lulusan. SKL di tingkat Kabupaten



Lombok Tengah adalah 6,03, lebih tinggi dari tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,00 dan tingkat nasional yang berada pada angka 5,96. Peringkat tertinggi kedua pada standar penilaian pendidikan dan standar pengelolaan pendidikan dengan capaian 5,90. Pada standar penilaian pendidikan, perolehan angka Kabupaten Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,04 dan nasional sebesar 5,99. Begitu pula dengan perolehan angka pada standar pengelolaan pendidikan masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun nasional. Adapun SNP yang memperoleh nilai terendah pada standar sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki nilai 3,84 dan nilai ini lebih rendah dari capaian mutu pada tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan nasional.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan distribusi capaian SNP pada setiap standar dan kriteria pada jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, perolehan capaian setiap standar berada pada “Menuju SNP 4”. Pada standar kelulusan terdapat 72% sekolah yang berada di “Menuju SNP 4”, hanya enam sekolah yang sudah SNP dan satu sekolah yang baru “Menuju SNP 1”. Standar isi terdapat 83% sekolah yang berada pada “Menuju SNP 4”, ada dua sekolah yang baru berada pada “Menuju SNP 1”, namun tidak ada sekolah yang sudah SNP. Pada Standar Proses, terdapat 76% sekolah yang statusnya “Menuju SNP 4”, ada lima sekolah masih “Menuju SNP 1”, dan tidak ada satupun sekolah yang sudah SNP. Pada standar penilaian Pendidikan terdapat 85% sekolah yang berada pada “Menuju SNP 4”, ada satu sekolah yang sudah berhasil mencapai SNP, dan tidak ada satupun sekolah yang “Menuju SNP 1”. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 69% yang “Menuju SNP 4”, ada tiga sekolah yang sudah SNP serta satu sekolah masih “Menuju SNP 1”. Standar sarana dan prasarana termasuk yang paling rendah karena hanya berada pada “Menuju SNP 3” yaitu 70% dan ada empat sekolah yang masih “Menuju SNP 1”. Untuk standar pengelolaan pendidikan ada 58% yang “Menuju SNP 4”, ada lima sekolah sudah SNP dan tidak ada sekolah yang masih “Menuju SNP 1”. Untuk standar pembiayaan terdapat 80% sekolah yang berstatus “Menuju SNP 4”, terdapat dua sekolah yang sudah SNP dan tidak ada sekolah yang masih “Menuju SNP 1”.



Gambar 3. Diagram Garis Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2020

Dari distribusi tersebut menunjukkan ada empat standar yang sudah dapat mencapai SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan. Adapun standar pendidikan yang berada pada “Menuju SNP 1” dan belum ada sekolah yang mencapai SNP yaitu standar isi, standar proses, dan standar sarana dan prasarana pendidikan.



Indikator Mutu dengan Capaian Tertinggi dan Terendah Jenjang SMA

Identifikasi capaian dari masing-masing indikator mutu pada setiap standar berdasarkan Rapot Mutu Kabupaten Lombok Tengah pada jenjang SMA tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Standar Kompetensi Lulusan.

Capaian tertinggi pada indikator 1.1 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. (6,15). Sedangkan capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan (5,96).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu;
- 2) guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik;
- 3) kompetensi keterampilan ini belum diintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan;
- 4) guru merasa terbebani dalam memberikan penilaian keterampilan karena instrumen dan prosedur yang rumit dan kurang dipahami;

b) Standar Isi.

Capaian tertinggi pada indikator 2.2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur (6,29). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 2.3 Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan (4,46).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) hari efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan;
- 2) bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang diprioritaskan;
- 3) pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidang pembinaan siswa terbatas dan;
- 4) dana sekolah untuk menyediakan tenaga pembimbing ekstra kurikuler terbatas.

c) Standar Proses.

Capaian tertinggi pada indikator 3.3 Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran (5,68). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan (4,95).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- a. sekolah tidak mengembangkan silabus;
- b. ketergantungan kepada sumber lain dalam pengembangan silabus;
- c. pendidik belum menyusun RPP secara mandiri atau menjiplak dari pendidik lainnya;
- d. pendidik belum paham mekanisme penyusunan RPP;
- e. pendidik tidak mendapat kesempatan aktualisasi diri dalam menyusun RPP;
- f. pengawasan proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal;
- g. kompetensi supervisi kepala sekolah dan pengawas rendah dan;
- h. kesibukan kepala sekolah dan pengawas sekolah.

d) Standar Penilaian Pendidikan.

Capaian tertinggi pada indikator 4.2 Teknik penilaian obyektif dan akuntabel (6,54). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 4.1 Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi (5,19).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) perangkat penilaian terutama untuk penilaian sikap memiliki indikator penilaian yang tidak lengkap;



- 2) kemampuan pendidik untuk mendeskripsikan capaian siswa dalam bentuk kalimat yang mendidik masih terbatas;
- 3) pemahaman pendidik terhadap proses penilaian masih belum maksimal dan;
- 4) sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.
 - e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Capaian tertinggi pada indikator 5.3 Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan (6,1). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 5.4 Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan (1,96).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) penyelenggara pendidikan selalu pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan;
- 2) dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga laboratorium;
- 3) tenaga kependidikan masih terbatas sehingga sekolah belum fokus pada kompetensi dan;
- 4) ruang laboratorium kurang memadai.

f) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Capaian tertinggi pada indikator 6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak (4,8). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak (1,97).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) luas lahan dan bangunan terbatas;
- 2) jumlah siswa dan rombongan belajar melebihi kapasitas;
- 3) pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berkala dan berkelanjutan;
- 4) pengadaan sarana hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah;
- 5) sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah rendah;
- 6) kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan tenaga laboran kurang baik dalam mengelola laboratorium;
- 7) aboratorium biologi, fisika dan kimia masih bergabung;
- 8) perabot minimal yang tersedia dalam rasio minimal jumlah per peserta didik sesuai deskripsi kondisinya;
- 9) peralatan pendidikan minimal yang tersedia dalam rasio minimal jumlah per peserta didik sesuai deskripsi kondisinya dan;
- 10) media Pendidikan minimal yang tersedia dalam jumlah minimal sesuai deskripsi kondisinya.

g) Standar Pengelolaan Pendidikan.

Capaian tertinggi pada indikator 7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan (6,34). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 7.2 Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan (5,58).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) kepala sekolah kurang mampu menjalankan tugas kepemimpinan;
- 2) warga sekolah dan pihak terkait tidak dilibatkan dalam perencanaan program pengelolaan;
- 3) kepala sekolah kurang mampu menjalankan tugas kepemimpinan;
- 4) sistem informasi manajemen sekolah tidak terkelola dengan baik;
- 5) komitmen penanggungjawab kegiatan rendah;
- 6) kegiatan layanan kesiswaan tidak tercakup dalam rencana kerja sekolah dan;



- 7) pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat mengembangkan keprofesiannya.
 h) Standar Pembiayaan.

Capaian tertinggi pada indikator 8.1 Sekolah memberikan layanan subsidi silang (7). Adapun capaian terendah (belum memenuhi mutu) pada indikator 8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik (5,48).

Penyebab lemahnya indikator tersebut karena:

- 1) pengambilan keputusan dalam pendanaan bersama pemangku kepentingan menimbulkan konflik internal;
- 2) kemampuan pendidik/tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan terbatas;
- 3) beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai bendahara terlalu banyak;
- 4) sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik;
- 5) kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik dan;
- 6) hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Capaian Rapor Mutu dan Akreditasi Sekolah Jenjang SMA

Hasil ketercapaian dari pemetaan mutu pendidikan dapat digunakan sebagai data pembandingan dengan status akreditasi sekolah. Di bawah ini adalah Tabel 4 capaian SNP berdasarkan predikat akreditasi jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah, baik negeri maupun swasta.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa SMA dengan status akreditasi A di Kabupaten Lombok Tengah, tidak ada satupun yang memperoleh kriteria SNP. Bahkan ada satu sekolah yang masih “Menuju SNP 2”, meskipun status sekolah tersebut mendapatkan akreditasi A. Sekolah dengan Akreditasi B, terdapat sebelas sekolah yang memperoleh kriteria “Menuju SNP 4”, namun masih ada sekolah yang kriterianya masih “Menuju SNP 2” sejumlah dua sekolah. Sekolah dengan status akreditasi C, justru ada tiga sekolah yang sudah memperoleh kriteria “Menuju SNP 4” sebanyak tiga sekolah. Namun sekolah dengan akreditasi C pada jenjang SMA di Kabupaten Lombok Tengah masih ada yang memperoleh kriteria “Menuju SNP 1” sebanyak satu sekolah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan dan kelemahan setiap indikator sampai sub indikator pada setiap standar, diperoleh potret pencapaian SNP yang perlu untuk direkomendasi kepada pemangku kepentingan pendidikan, termasuk strategi/ kegiatan peningkatan mutu yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan.

Tabel 4. Capaian SNP Berdasarkan Predikat Akreditasi Jenjang SMA

Kriteria	Akreditasi A		Jumlah	Akreditasi B		Jumlah	Akreditasi C		Jumlah	Tidak Terakreditasi	
	Negeri	Swast		Negeri	Swasta		Negeri	Swast		Negeri	Swast
Menuju SNP 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Menuju SNP 2	1	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0
Menuju SNP 3	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0
Menuju SNP 4	9	5	14	5	6	11	0	3	3	0	0
SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10	5	15	5	9	14	0	8	8	0	0



Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Mengacu pada penyebab standar mutu tidak tercapai, maka rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu bagi daerah sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut;

- 1) mendorong pemerintah dan sekolah untuk meminimalisi guru dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu;
- 2) mendorong pemerintah untuk menambah kuota PPG untuk pendidik;
- 3) menyusun silabus dan RPP yang mendorong realisasi kompetensi keterampilan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan;
- 4) menyusun instrumen penilaian keterampilan yang lebih sederhana.

b. Standar Isi.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar isi adalah sebagai berikut:

- 1) membangun pembelajaran Blended Learning untuk mengatasi keterbatasan jam efektif;
- 2) mendorong sekolah untuk mencari pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidang pembinaan siswa tertentu dan;
- 3) menambah alokasi dana sekolah untuk menyediakan tenaga pembimbing ekstra kurikuler yang sesuai bidangnya.

c. Standar Proses.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar proses adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong sekolah untuk mengembangkan silabus dan RPP yang sesuai dengan kondisi sekolah;
- 2) mendorong sekolah untuk mengadakan workshop terkait dengan mekanisme pengusunan silabus dan RPP yang sesuai dengan kondisi sekolah;
- 3) memberi kesempatan pendidik untuk mendapat kesempatan aktualisasi diri dalam menyusun RPP melalui rapat, sosialisasi atau workshop;
- 4) mendorong kepala sekolah untuk melakukan pengawasan proses pembelajaran secara optimal;
- 5) mendorong pemerintah dalam meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah dan;
- 6) mendorong pemerintah untuk mengarahkan kepala sekolah dan pengawas agar fokus melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pendidik.

d. Standar Penilaian Pendidikan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar penilaian pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong sekolah untuk mengadakan workshop Penyusunan perangkat penilaian yang mudah dilaksanakan oleh pendidik dan;
- 2) mendorong sekolah untuk memastikan pendidik untuk benar-benar melakukan penilaian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut;



- 1) mendorong penyelenggara pendidikan untuk selalu memperhatikan pengelolaan sumber daya tenaga kependidikan;
- 2) mendorong sekolah untuk mengalokasikan dana yang dimiliki sekolah untuk menyediakan kepala tenaga laboratorium dan;
- 3) mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dana pengadaan ruang laboratorium yang memadai.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan lahan dan bangunan sekolah yang terbatas;
- 2) mendorong pemerintah untuk menyusun sistem PPDB yang tepat sehingga tidak ada sekolah yang jumlah siswa dan rombongan belajar melebihi kapasitas;
- 3) mendorong sekolah untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkelanjutan;
- 4) mendorong sekolah untuk menyisihkan anggaran sekolah sebagai dana sharing dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah;
- 5) mendorong warga sekolah melalui sosialisasi, pengumuman dan poster sekolah untuk menumbuhkan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah;
- 6) mendorong sekolah untuk melakukan sertifikasi bagi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknis laboratorium dan tenaga laboran dan;
- 7) mendorong sekolah untuk menyediakan perabot, peralatan dan media pendidikan dalam rasio minimal jumlah per peserta didik sesuai deskripsi kondisinya.

g. Standar Pengelolaan Pendidikan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong pemerintah untuk menetapkan kepala sekolah yang mampu menjalankan tugas kepemimpinan;
- 2) mendorong sekolah untuk melibatkan warga sekolah dan pihak terkait tidak dalam perencanaan program pengelolaan dan;
- 3) mendorong sekolah untuk membangun sistem informasi manajemen sekolah yang dikelola dengan baik.

h. Standar Pembiayaan.

Rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan pada standar pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong sekolah untuk membangun sistem informasi manajemen keuangan yang berbasis teknologi dan komunikasi dan;
- 2) mendorong sekolah untuk memilih bendahara sekolah dari staf sekolah bukan dari pendidik, agar beban kinerja pendidik tidak terlalu banyak.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis peta mutu pendidikan SMA Kabupaten Lombok Tengah ini adalah tidak ada satupun SMA yang “Menuju SNP 5” atau memperoleh kriteria SNP walaupun status akreditasinya A, dan “Menuju SNP 4”, dengan akreditasi B sebanyak sebelas sekolah, “Menuju SNP 4” dengan status akreditasi C sebanyak tiga



sekolah, “Menuju SNP 2” dengan status akreditasi C sejumlah dua sekolah, “Menuju SNP 1” dengan status akreditasi C sebanyak satu sekolah. Berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan setiap indikator sampai sub indikator pada setiap standar, diperoleh potret pencapaian SNP yang perlu untuk direkomendasikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, termasuk strategi peningkatan mutu yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan.

Saran

Adapun saran dalam berdasarkan hasil penelitian ini antara lain, yaitu :

- a) Bagi satuan pendidikan untuk dapat mencapai SNP hendaknya melakukan :
 - 1) penyesuaian kualifikasi pendidikan yang linear sesuai mata pelajaran yang diampu melalui program ekstensi pendidikan strata satu (S1);
 - 2) workshop penyusunan Silabus dan RPP Merdeka Belajar di KKG dan/atau MGMP;
 - 3) peningkatan kompetensi supervisi akademik kepala sekolah dan manajerial pengawas sekolah secara terpadu;
 - 4) pendampingan pelaksanaan penilaian sesuai prosedur oleh kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah
 - 5) penerapan peraturan tentang PPDB yang ketat dan tegas dan kuota tiap sekolah ditentukan oleh Dinas Pendidikan;
- b) Bagi Dinas Terkait
 - 1) program Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) bagi kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari delapan tahun;
 - 2) pendampingan penyusunan RKS, RKJM, RKT dan RKAS;
 - 3) penyesuaian tugas pokok dan fungsi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan beban kerja menuju penilaian kinerja guru (PK Guru), penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS), penilaian kinerja pengawas sekolah (PKPS), dan menjadi dasar pengukuran sasaran kinerja pegawai (SKP)
- c) Bagi Pemerintah Daerah agar dapat menindak lanjuti rekomendasi- rekomendasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2017, Pengumpulan Data Peta Mutu Satuan Pendidikan.
- Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2017, Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2017, Petunjuk Teknis Pengembangan Peta Mutu.
- Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2017, Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Sekolah Mengah Atas.
- Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2019, Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan.
- Prayoga, S. (2020). Pendampingan Implementasi SPMI di Sekolah Model dan Sekolah Imbas SMA Kota Mataram 2019. *Jurnal Paedagogy*, 7(1), 25-34. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v7i1.2512>



- Purnamaraya, S. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik di SD Negeri 45 Mataram. *Jurnal Paedagogy*, 6(2), 49-58. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v6i2.2531>
- Putra, H. (2021). Hasil Supervisi Mutu Pendidikan pada Sekolah Model SMK Negeri 1 Pujut Tahun 2020. *Jurnal Paedagogy*, 8(2), 169-180. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v8i2.3522>
- Rusdi, T. (2020). Upaya Peningkatan Mutu Guru Melalui Pembimbingan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas di MIN 2 Kota Mataram. *Jurnal Paedagogy*, 7(3), 216-225. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v7i3.2731>
- Rusmiarsi, R. (2017). Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik di SD Negeri 40 Ampenan. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 3(2). doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v3i2.680>
- Suginam, A. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas dalam Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik di SD Negeri 4 Mataram. *Jurnal Paedagogy*, 6(2), 41-48. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v6i2.2530>
- Supatni, P. (2017). Mengefektifkan Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas dalam Proses Pembelajaran di SDN 36 Ampenan. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v3i1.473>
- Yuniati, S., & Prayoga, S. (2019). Pengaruh Manajemen Perencanaan Pembelajaran Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Mataram. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 5(2), 133-140. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v5i2.1811>